

BAB I

PENDAHULUAN

1. A Latar Belakang Masalah

Pembangunan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat terhadap peran manusia sebagai tenaga kerja. Pembangunan ekonomi di suatu wilayah mencakup interaksi dari berbagai variabel seperti sumber daya manusia, teknologi, modal, dan lain sebagainya (Pangastuti, 2015, hlm. 204). Selaras dengan pendapat Lahemba, et al (2022, hlm. 52) yang menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang paling penting dan sangat berpengaruh terhadap pengelolaan dan pengendalian sistem ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi dan investasi. Oleh karena itu manusia memiliki peran penting dalam pengelolaan pembangunan ekonomi, dalam hal ini manusia dapat berperan sebagai tenaga kerja, input pembangunan serta konsumen dari barang yang diproduksi.

Wasilaputri (2016, hlm. 244) menyebutkan bahwa setiap daerah hampir memiliki permasalahan yang sama. Masalah tenagakerja merupakan masalah yang sangat kompleks di suatu daerah, karena berpengaruh serta dapat mempengaruhi banyak faktor yang tentunya saling berhubungan dengan pola yang tidak bisa dipastikan, serta dikatakan masalah besar karena masalah tenaga kerja menyangkut banyak orang (Sholeh, 2007, hlm. 62). Hal tersebut menyebabkan sulitnya menggambarkan masalah tenaga kerja di masa yang akan datang, karena harus mempertimbangkan, memperhitungkan, serta

berpatokan pada jumlah tenaga kerja di masa lampau serta harus mengetahui prospek produksi di masa yang akan datang.

Sari et al (2016, hlm. 110) menyatakan bahwa tenaga kerja merupakan suatu faktor yang memiliki pengaruh cukup besar terhadap output suatu wilayah, tingkat tenaga kerja yang relatif tinggi secara otomatis akan timbul karena tingginya jumlah penduduk. Besarnya jumlah penduduk di suatu daerah akan selalu diikuti oleh besarnya angkatan kerja di setiap periodenya, karena kedua hal tersebut merupakan faktor yang saling berkaitan. Terus meningkatnya angkatan kerja di suatu daerah apabila tidak diikuti dengan ketersediaan lapangan pekerjaan maka akan terjadi penumpukan jumlah angkatan kerja yang akan berdampak pada tingginya angka pengangguran di daerah tersebut.

Tenaga kerja yang terserap harus disertai dengan kemampuan serta keterampilan yang memadai dalam suatu bidang tertentu agar dapat memaksimalkan produksi. Allah SWT menganjurkan umatnya agar mencari pekerjaan sesuai dengan kemampuan dan sesuai dengan napa yang diminati serta memberi manfaat bagi orang lain, seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah At-Taubah ayat 105 yang berbunyi:

وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: *Dan katakanlah “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan.”* QS. At-Taubah: 105.

Ayat tersebut menyatakan bahwa Allah SWT memerintahkan umatnya untuk melakukan pekerjaan yang dapat mendatangkan manfaat untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Apapun yang dilakukan manusia akan dilihat oleh Allah SWT, dan perilaku tersebut akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah SWT pada hari kiamat kelak, dan selanjutnya akan diberi balasan sesuai dengan amal perbuatannya ketika berada di bumi. Jika amal perbuatan yang diperbuat di muka bumi baik maka akan mendapat pahala dan sebaliknya jika amal ibadah yang dilakukan jelek maka akan diberikan siksaan atas apa yang telah diperbuat (Kurniawan, 2019, hlm. 51).

Pendapat tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Pewangi (2010, hlm. 81) yang menyebutkan bahwa nilai kerja di dalam Islam sangat dijunjung tinggi dan Islam menganjurkan umatnya untuk bekerja sesuai dengan apa yang mereka sukai dan mereka kuasai. Bekerja dengan tujuan memperoleh kehidupan yang layak maupun untuk menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kehidupannya, karena ibadah semata-mata karena Allah SWT. Diperkuat dengan firman Allah SWT pada Qur'an Surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ ۚ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولٌ

Artinya: *“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang tidak kamu miliki pengetahuannya, sesungguhnya pendengaran, pengelihatannya, dan hati akan dimintai pertanggungjawabannya”* (Q.S Al-Isra: 65).

Selain itu Allah SWT berfirman pada surah An-Najm ayat 39 yang berbunyi:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

Artinya: *Dan manusia hanya akan memperoleh atas apa yang ia usahakan* (Q.S An-Najm:39).

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan diturunkan ayat ini Allah SWT berjanji akan memberikan balasan kepada umatnya yang mau bekerja keras. Setiap usaha dan ikhtiar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya harus diawali dengan niat semata-mata untuk mencari ridha Allah SWT (Nabila et al, 2021, hlm. 85). Untuk itu perlu adanya usaha yang maksimal dalam hal apapun terutama dalam pekerjaan, karena di dunia ini untuk mendapatkan sesuatu harus melewati proses terlebih dahulu, semua yang akan dicapai diperlukan usaha keras dalam memperolehnya. Pencapaian yang akan diterima diukur dari seberapa besar usaha yang dilakukan. Hal tersebut akan membangun jiwa bersaing setiap manusia agar tidak mudah menyerah dalam melakukan suatu hal.

Todaro dalam penelitian Budiawan (2012, hlm. 2) menyatakan bahwa penyediaan lapangan kerja akan lebih berat apabila dilihat dari kualitas kesempatan kerja itu sendiri. Besarnya angka tenaga kerja pada suatu daerah dan lambatnya penyerapan tenagakerja merupakan masalah besar yang dihadapi hampir semua daerah di negara berkembang. Kesempatan kerja terjadi saat industri mulai berkembang, akan tetapi berkembangnya industri selalu disertai dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih, akibatnya banyak perusahaan yang memanfaatkan teknologi hemat tenaga kerja. Hal tersebut tentunya sangat berdampak pada tenaga kerja, karena otomatis banyak tenaga kerja yang kesempatannya digantikan oleh teknologi, perusahaan akan mengurangi kebutuhan tenaga kerja manusia.

Faktor yang dapat mempengaruhi ketenagakerjaan berikutnya yaitu jumlah penduduk. Jumlah penduduk yang tinggi pada suatu daerah dapat memberi potensi yang besar terhadap pembangunan. Akan tetapi tingginya jumlah penduduk dalam suatu daerah juga dapat menimbulkan masalah, karena semakin tinggi jumlah penduduk maka akan semakin bertambah pula jumlah angkatan kerja di daerah tersebut (Wihastusi & Rahmatullah, 2018, hlm. 96). Laju pertumbuhan yang cukup pesat otomatis jumlah angkata kerja juga meningkat, pada kondisi ini apabila tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan yang mampu menyerap tenaga kerja maka akan terjadi peningkatan pengangguran.

Ketidakseimbangan antara angkatan kerja dengan ketersediaan lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah pengangguran (Pangastuti, 2015, hlm. 204). Pengangguran merupakan permasalahan yang tidak bisa diprediksi keberadaannya, akan tetapi terus menjadi penyakit di beberapa daerah, hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti kurangnya keahlian dan pengetahuan, serta kondisi dari masyarakat setempat (Franita, et al, 2019, hlm. 89). Untuk itu perlu adanya pengawasan serta penanganan yang serius terhadap ketenagakerjaan agar tidak menimbulkan peningkatan angka pengangguran di suatu daerah.

Selain itu Produk Domestik Regional Bruto (Selanjutnya disingkat PDRB) juga memiliki pengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja di suatu daerah. Laju PDRB yang digunakan sebagai tolak ukur pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dapat menciptakan lapangan kerja lebih banyak, pada kenyataannya tidak mampu merealisasikan harapan. Tenaga kerja yang terserap masih cenderung rendah, dan pengangguran masih terus meningkat. Hal ini terjadi salah satunya karena adanya

pengaruh serikat kerja dan intervensi pemerintah dalam penentuan upah minimum (Dimas & Woyanti, 2009, hlm. 32).

PDRB memiliki pengaruh terhadap angkatan kerja karena apabila jumlah produksi regional domestik di suatu daerah tersebut meningkat, maka secara otomatis output dan penjualan seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah meningkat, hal ini tentu saja akan meningkatkan jumlah permintaan angkatan kerja pada setiap daerah (Ali et al, 2020, hlm. 44). Selain jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk, upah minimum dan PDRB

Belanja daerah, atau yang sering disebut sebagai pengeluaran daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APDB) merupakan salah satu faktor pertumbuhan ekonomi daerah. Belanja daerah termasuk dalam salah satu kebijakan fiskal yang dilakukan oleh pemerintah (Kairupan, 2013, hlm. 2208). Untuk itu semakin banyaknya pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada belanja daerah diharapkan dapat meningkatkan kegiatan perekonomian daerah tersebut. Belanja daerah diharapkan mampu meningkatkan kualitas fasilitas yang mendukung meingatnya perekonomian daerah, sehingga mampu mendorong penyerapan tenaga kerja.

Daerah Istimewa Yogyakarta (Selanjutnya akan disingkat DIY) merupakan salah satu daerah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk cukup banyak. DIY terdiri dari empat Kabupaten dan satu Kota, yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul, dan Kabupaten Bantul, serta Kota Yogyakarta. Laju pertumbuhan penduduk di Provinsi DIY menunjukkan

perkembangan yang signifikan atau relatif meningkat (Nurul et al., 2016, hlm. 2). Dibuktikan dari data jumlah penduduk yang terdapat pada Badan Pusat Statistik (Selanjutnya disingkat BPS), menyebutkan bahwa jumlah penduduk di DIY pada tahun 2015 sebesar 3.669.199 jiwa, pada tahun 2016 sebanyak 3.718.553 jiwa, pada tahun 2017 sebanyak 3.768.235 jiwa, tahun 2018 sebanyak 3.818.266 jiwa, tahun 2019 sebanyak 3.86.588 jiwa, tahun 2019 sebanyak 3.868.588 jiwa, tahun 2020 sebanyak 3.919.197 jiwa, dan pada tahun 2021 jumlah penduduk di Provinsi DIY sebanyak 3.970.220 jiwa. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk di Provinsi DIY setiap tahunnya mengalami peningkatan. Laju pertumbuhan yang cepat secara otomatis akan meningkatkan jumlah angkatan kerja, pada kondisi ini apabila tidak disertai dengan penyediaan lapangan pekerjaan akan menimbulkan masalah baru pada koondisi ketenagakerjaan di Provinsi DIY.

Kondisi ketenagakerjaan Provinsi DIY masih menjadi permasalahan yang terus diperhatikan perkembangannya oleh pemerintah Provinsi DIY. Hal tersebut dibuktikan pada data kondisi ketenagakerjaan DIY yang terdapat di BPS DIY.

Tabel 1.1 Kondisi Ketenagakerjaan DIY Tahun 2009-2021

Tahun	Jumlah pnduduk usia kerja (orang)	Angkatan kerja (orang)	Jumlah penduduk bekerja (orang)
2009	2.871.719,	1 143 346	1.925.630
2010	2.698.134	1 161 961	1.942.764
2011	2.747.466	1.242.655	1.798.594
2012	2.780.461	1.988.543	1.911.723
2013	2.813.084	1.949.232	1.886.072
2014	2.847.752	2.023.463	1.956.072
2015	2.882.981	1.971.460	1.891.223
2016	2.917.653	2.099.441	2.042.404
2017	2.960.204	2.117.187	2.053.172
2018	2.987.330	2.191.742	2.118.392
2019	3.088.829	2.246.194	2.174.172
2020	3.132.754	2.228.162	2.126.324

Tahun	Jumlah penduduk usia kerja (orang)	Angkatan kerja (orang)	Jumlah penduduk bekerja (orang)
2009	2.871.719,	1 143 346	1.925.630
2010	2.698.134	1 161 961	1.942.764
2011	2.747.466	1.242.655	1.798.594
2012	2.780.461	1.988.543	1.911.723
2021	3.175.789	2.334.955	2.228.522

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) DIY

Pada data tersebut yang dimaksud dengan jumlah penduduk usia kerja adalah penduduk di Provinsi DIY yang sudah memasuki usia kerja, yaitu usia 15 tahun ke atas. Untuk angkatan kerja yang dimaksud adalah penduduk di Provinsi DIY usia kerja yang sudah bekerja, pengangguran, bekerja tidak dibayar, dan bekerja akan tetapi sementara tidak bekerja. Sedangkan untuk jumlah penduduk bekerja merupakan penduduk Provinsi DIY yang telah memasuki usia kerja dan sudah atau sedang bekerja.

Tabel 1 menunjukkan kondisi ketenagakerjaan di Provinsi DIY pada tahun 2009-2021. Dari data tersebut dapat dilihat bahwa pertumbuhan penduduk di Provinsi DIY terus meningkat dari tahun ke tahun. Sedangkan jumlah angkatan kerja setiap tahun mengalami kenaikan dan penurunan, seperti pada tahun 2013 jumlah tenaga kerja mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2012, yaitu dari 1.988.539 jiwa angkatan kerja menjadi 1.949.234 jiwa angkatan kerja, selanjutnya pada 2014 mengalami kenaikan dibandingkan jumlah angkatan kerja tahun 2013 yaitu sebesar 2.023.461 jiwa dan mengalami peningkatan di tahun 2015 yaitu sebesar 1.971.463 jiwa, jumlah angkatan kerja mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 2.228.162 jiwa. Sementara untuk angka penduduk bekerja atau terserap mengalami kenaikan dan juga penurunan. Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2011 yaitu

sebesar 1.798.594 jiwa , 2013 1.886.072 jiwa, dan 2015 1.891.223 jiwa, setelah itu mengalami peningkatan dari tahun 2014-2019. Akan tetapi mengalami penurunan Kembali pada tahun 2020 yaitu dari 2.174.172 jiwa menjadi 2.126.324 jiwa, setelah itu mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2021 yaitu sebesar 2.228.522 jiwa. Besar kecilnya penurunan yang terjadi akan berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Provinsi DIY. Untuk itu dengan terus meningkatnya jumlah penduduk dan juga jumlah angkatan kerja yang tidak diikuti oleh ketersediaan lapangan pekerjaan menimbulkan suatu permasalahan pada lingkup ketenagakerjaan di Provinsi DIY.

Melihat kondisi tersebut peran pemerintah DIY sangat dibutuhkan dalam penyediaan lapangan pekerjaan, sehingga peningkatan jumlah penduduk yang terjadi dapat terserap. Meningkatnya angkatan kerja menandakan bahwa permintaan tenaga kerja pada pasar bertambah, akan tetapi pada kenyataannya meningkatnya permintaan tenaga kerja tidak selalu diiringi dengan penawaran tenaga kerja yang dapat menyerap jumlah angkatan kerja (Wasilaputri, 2016, hlm. 244).

Tabel 1.2 Tingkat PDRB DIY per Kabupaten Tahun 2017-2021

Kabupaten/Kota	2017	2018	2019	2020	2021
Kab. Sleman	40.047.863	43.793.253	47.580.784	45.833.487	49.500.004
Kab. Kulonprogo	9.060.465	10.312.524	11.995.771	11.654.319	12.443.063
Kab. Gunungkidul	16.199.841	17.527.715	18.844.736	18.936.171	20.427.097
Kab. Bantul	22.611.706	24.450.119	26.310.972	26.137.015	28.123.173
Kota Yogyakarta	31.309.045	33.787.580	36.492.640	35.757.539	38.416.517

Sumber: BPS DIY

Tabel 1.2 menjelaskan bahwa jumlah PDRB Per Kabupaten di DIY baik dari PDRB Kabupaten Sleman, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Gunungkidul,

Kabupaten Bantul, dan Kota Yogyakarta relatif mengalami peningkatan setiap tahunnya. Akan tetapi pada tahun 2020 PDRB seluruhnya mengalami penurunan dan mengalami kenaikan Kembali pada tahun 2021. Dinas Industri dan Perdagangan (DISPERINDAG) DIY menyebutkan bahwa terjadinya penurunan tingkat PDRB di setiap Kabupaten dan Kota DIY pada tahun 2020 disebabkan oleh terjadinya penurunan aktivitas perdagangan, terutama perdagangan dalam negeri.

Muslihatinningsih et al (2020) dalam penelitiannya memperoleh hasil bahwa PDRB dan Jumlah Penduduk memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Hasil tersebut memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh Prayogo (2022) yang memperoleh hasil bahwa PDRB memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja di Povinsi DIY dan variabel jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Determinan Penyerapan Tenaga Kerja dan Pengaruhnya di Provinsi DIY Kasus 2009-2021.”

1. B Rumusan Masalah

Ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek dasar yang terdapat pada diri manusia, karena menyangkut kondisi sosial dan ekonomi. Hal tersebut terjadi karena dalam lingkup ketenagakerjaan terdiri lebih dari manusia yang berinteraksi. Kondisi sosial yang dimaksud merupakan gambaran interaksi antar pekerja, dan menyangkut kondisi ekonomi karena mereka memiliki satu

tujuan yang sama yaitu sebagai penyedia lapangan pekerjaan maupun sebagai pekerja untuk memenuhi sandang, papan, dan pangan.

Provinsi DIY merupakan salah satu Provinsi di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk cukup besar. BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk di DIY relatif mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Meningkatnya jumlah penduduk di DIY secara otomatis juga akan meningkatkan jumlah angkatan kerja. Sementara jumlah angkatan kerja yang terus meningkat jika tidak diseimbangi dengan ketersediaan lapangan kerja akan menimbulkan suatu masalah ketenagakerjaan, yaitu meningkatnya angka pengangguran.

Laju pertumbuhan ekonomi di Provinsi DIY dapat dilihat dari tingkat PDRB, pada tahun 2021 Provinsi DIY mengalami kemajuan yang lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Akan tetapi dalam perkembangannya PDRB DIY mengalami beberapa hambatan seperti adanya penurunan aktivitas perdagangan terutama perdagangan masyarakat. Belanja Daerah memiliki pengaruh yang cukup signifikan dalam meningkatkan perekonomian suatu daerah khususnya DIY. Semakin besar biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk pembelanjaan daerah, seharusnya dapat meningkatkan kualitas sarana pra sarana di DIY, sehingga dapat menyerap lebih banyak tenaga kerja dengan tersedianya fasilitas yang disediakan oleh pemerintah setempat.

Tersedianya fasilitas yang berkualitas tentunya tidak terlepas dari besar kecilnya pengeluaran pemerintah yang dialokasikan pada belanja daerah. Semakin banyak biaya yang dikeluarkan pemerintah setempat untuk belanja daerah, diharapkan dapat memperbaiki sarana pra sarana dan meningkatkan

perkonomian daerah setempat. Dalam E -Parlemen DPRD DIY menyebutkan bahwa kemampuan anggaran yang dimiliki oleh pemerintahan DIY masih terbatas dibandingkan dengan banyaknya kebutuhan yang harus direalisasikan.

Berdasarkan dari latar belakang serta uraian diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini yaitu:

- 1.B.1. Bagaimana pengaruh jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY tahun 2009-2021?
- 1.B.2. Bagaimana pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY tahun 2009-2021?
- 1.B.3. Bagaimana pengaruh Belanja Daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY tahun 2009-2021?

1. C Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang serta rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1.C.1. Menganalisis pengaruh jumlah penduduk terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY pada tahun 2009-2021
- 1.C.2. Menganalisis pengaruh PDRB terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY tahun 2009 -2021
- 1.C.3. Menganalisis pengaruh Belanja Daerah terhadap penyerapan tenaga kerja di Provinsi DIY tahun 2009-2021.

1. D Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Hasil pada penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang menggunakan tema serupa.
2. Hasil dalam penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengetahuan serta informasi bagi masyarakat DIY terutama kepadamasyarakat yang telah memasuki usia kerja
3. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan serta pertimbangan dalam pengambilan keputusan untuk instansi-instansi terkait dalam kebijakan penyerapan tenaga kerja DIY.